

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) *Mobile* di Kabupaten Karawang

Mobile Community Learning Centre (Mobile PKBM)

*Eka Setiawati*¹

¹ Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang

Corresponding Author:

¹setiawatieka@gmail.com

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator pemantau pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah, yang variable-variabelnya terdiri dari Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli. Rata-rata Lama sekolah adalah salah satu dari 2 sub variabel yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini karena menjadi faktor penghambat meningkatnya Indeks Pendidikan yang saat ini masih berada di level “sedang”. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Oleh karena itu, *quick win* peningkatan RLS diprioritaskan pada usia tersebut, yang setelah dipelajari karakteristik mental dan fisiknya, maka sasaran dipersempit lagi dengan kelompok usia 25-40 tahun. Dengan jumlah 53 unit PKBM diseluruh Kabupaten Karawang atau rata-rata 1-2 PKBM dalam satu kecamatan, dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan partisipasi pendidikan kesetaraan masih rendah karena terkendala jarak. namun demikian, Kabupaten lain di Jawa Barat yang memiliki PKBM dalam jumlah banyak juga tidak berbanding lurus dengan capaian RLS nya. Untuk itu perlu inovasi yang menghubungkan ketersediaan sarana prasarana dengan karakteristik fisik dan mental manusia usia 25-40 tahun. Salah satu solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan RLS adalah melalui PKBM Mobile (sekolah yang mendekati siswa belajar), sehingga cakupan layanan pendidikan kesetaraan menjadi lebih luas, tanpa harus menambah jumlah PKBM baru.

Kata kunci: *PKBM, Indeks Pembangunan Manusia, Karawang, Rata-rata Lama Sekolah*

EXECUTIVE SUMMARY

The Human Development Index is a measure of a region's progress toward human development, and its components include the Education Index, Health Index, and Purchasing Power Index. The average length of education is one of the two subvariables covered in this article since it represents a barrier to boosting the Education Index, which is now at the "medium" level. Mean Years School (MYS) is defined as the number of years spent in formal education by people aged 25 and up. As a result, the authors propose that the quick win in improving MYS is prioritized at that age, and that the focus is restricted again to the age bracket of 25-40 years after evaluating the mental and physical features. With a total of 53 PKBM units across Karawang Regency, or an average of 1-2 PKBMs in one sub-district, distance restrictions may be one of the causes generating limited participation in equality education. However, other districts in West Java with a big number of PKBMs are not directly proportionate to the MYS's achievement. As a result,

innovation that connects infrastructure availability with the physical and mental qualities of persons aged 25-40 years is required. One method provided to enhance MYS is through PKBM Mobile (schools that approach student learning), which broadens the reach of equity education services without adding a large number of additional PKBMs.

Keywords: PKBM, Human Development Index, Karawang, Mean Years School

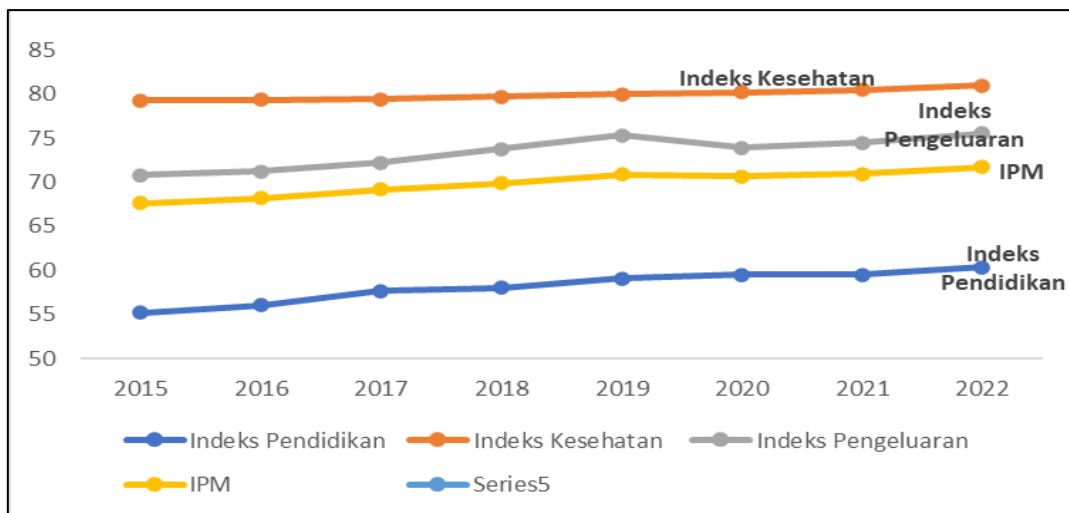
1. Pendahuluan

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Karawang dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021 sampai dengan 2026 adalah “Mewujudkan Karawang Mandiri Bermartabat dan Sejahtera”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang terpilih untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Terwujudnya Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif, Produktif dan Berdaya Saing serta Berbasis pada Potensi Lokal;
3. Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Aman, Nyaman dan Mendukung Proses Pembangunan yang Berkesinambungan;
4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator pemantau pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM menjadi strategis sebagai indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan yang bersifat non fisik. IPM dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.



Sumber: <https://karawangkab.bps.go.id>, 2023

Gambar 1. IPM dan Komponennya

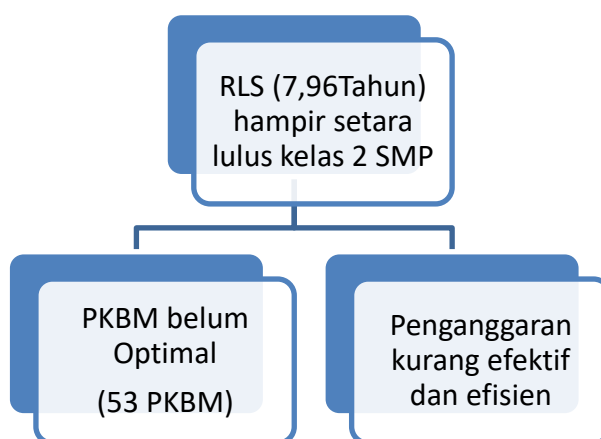
Secara umum pembangunan manusia Kabupaten Karawang selama periode 2015-2022 terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2022 IPM Kabupaten Karawang pertama kalinya masuk dalam kategori “tinggi” sampai tahun 2022 terus meningkat.

2. Deskripsi Masalah

Terdapat 3 (tiga) komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia yaitu Indeks Kesehatan yang diformulasi dari Usia Harapan Hidup, Indeks Daya Beli yang diformulasi dari *Purchasing Power Parity* atau Daya Belidan Indeks Pendidikan yang diformulasikan dari 2 variabel yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Indeks Pendidikan dibentuk oleh 2 (dua) variabel sebagaimana disebutkan sebelumnya yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata lama sekolah (RLS). Agar menghasilkan indeks pendidikan yang optimal, maka keduanya harus diupayakan mencapai hasil yang sama. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, angka HLS Kabupaten Karawang Tahun 2020-2022 adalah: 12,09 tahun, 12,10 tahun dan 12,19 tahun sedangkan RLS Kabupaten Karawang tahun 2020-2022 adalah 7,77 tahun, 7,78 tahun dan 7,96 tahun, sehingga menunjukkan gap yang sangat besar di antara keduanya yaitu kurang lebih 5 tahun.

Permasalahan RLS di Kabupaten Karawang diidentifikasi dengan Teknik penyusunan pohon masalah sekaligus alternatif solusi untuk setiap akar masalah. Sebagaimana bagan di bawah ini:



Gambar 2. Pohon Masalah

Dengan Teknik Analisa pohon masalah, maka terdapat 2 akar masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. PKBM yang ada belum optimal meningkatkan RLS;
2. Kualitas dan Kuantitas Perencanaan dan Penganggaran pendidikan kesetaraan yang kurang efektif dari tahun ke tahun

3. Rekomendasi Kebijakan

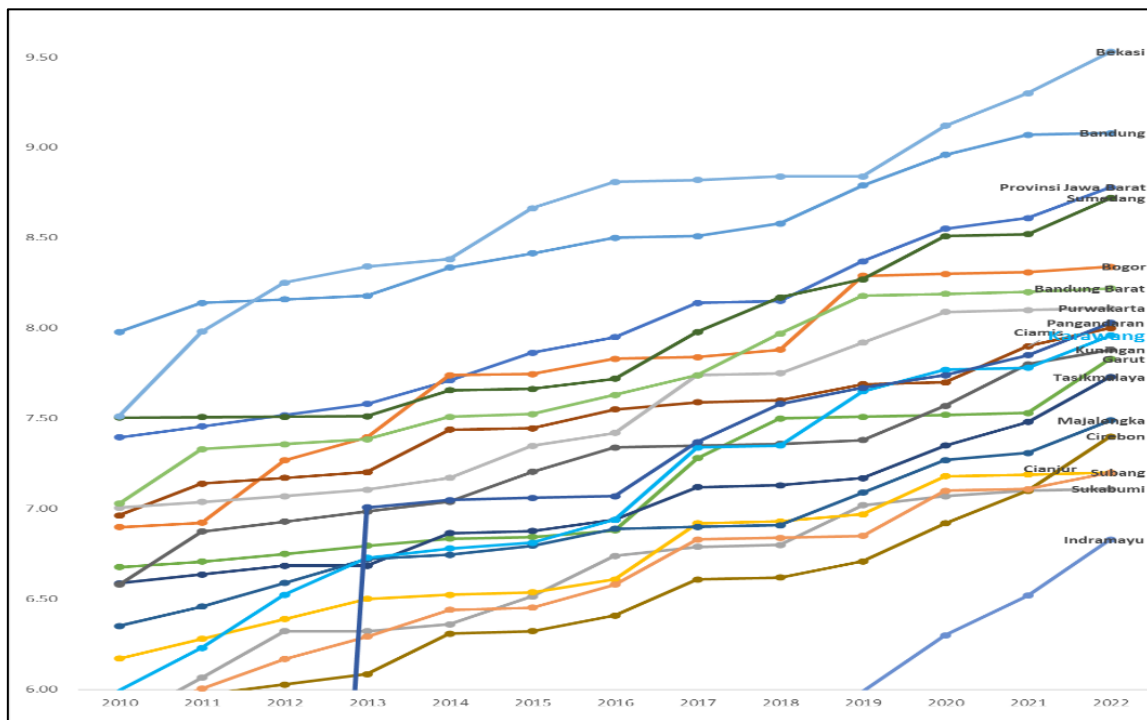
3.1. Capaian Rata-Lama Sekolah dan Pertumbuhannya di Kabupaten Karawang

Berdasarkan data BPS, RLS Kabupaten Karawang tahun 2022 menempati posisi ke 9 di antara Kabupaten Se-Jawa Barat di bawah Kab. Bekasi, Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Bogor, Kab. Bandung Barat, Kab. Purwakarta, Kab. Pangandaran, dan Kab. Ciamis. Laju pertumbuhan RLS tahun 2011-2022 sangat fluktuatif sehingga perlu diupayakan pengawalan agar laju pertumbuhan ini stabil dan terus meningkat.

Tabel 1. Capaian RLS dan Pertumbuhannya Tahun 2010-2022

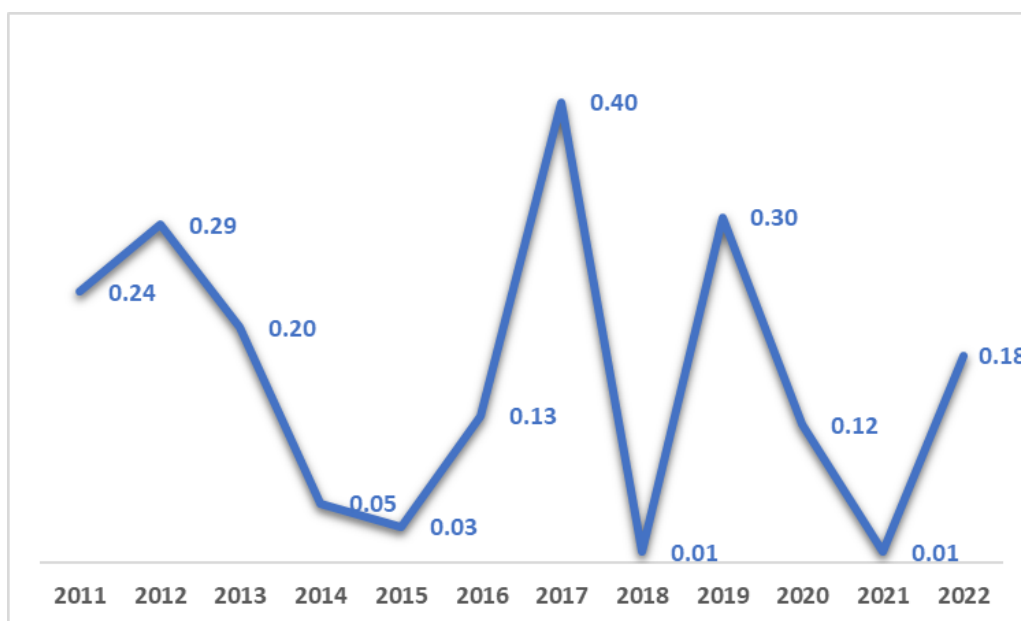
Pemda	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Provinsi Jawa Barat	7.40	7.46	7.52	7.58	7.71	7.86	7.95	8.14	8.15	8.37	8.55	8.61	8.78
Bogor	6.90	6.92	7.27	7.40	7.74	7.75	7.83	7.84	7.88	8.29	8.3	8.31	8.34
Sukabumi	5.82	6.07	6.32	6.32	6.36	6.51	6.74	6.79	6.80	7.02	7.07	7.1	7.11
Cianjur	6.17	6.28	6.39	6.50	6.52	6.54	6.61	6.92	6.93	6.97	7.18	7.19	7.2
Bandung	7.98	8.14	8.16	8.18	8.34	8.41	8.50	8.51	8.58	8.79	8.96	9.07	9.08
Garut	6.68	6.71	6.75	6.80	6.83	6.84	6.88	7.28	7.50	7.51	7.52	7.53	7.83
Tasikmalaya	6.59	6.64	6.68	6.69	6.87	6.88	6.94	7.12	7.13	7.17	7.35	7.48	7.73
Ciamis	6.96	7.14	7.17	7.20	7.44	7.45	7.55	7.59	7.60	7.69	7.7	7.9	8.00
Kuningan	6.58	6.87	6.93	6.98	7.04	7.20	7.34	7.35	7.36	7.38	7.57	7.8	7.88
Cirebon	5.92	5.97	6.03	6.08	6.31	6.32	6.41	6.61	6.62	6.71	6.92	7.1	7.4
Majalengka	6.35	6.46	6.59	6.72	6.75	6.80	6.89	6.90	6.91	7.09	7.27	7.31	7.49
Sumedang	7.51	7.51	7.51	7.51	7.66	7.66	7.72	7.98	8.17	8.27	8.51	8.52	8.72
Indramayu	4.93	4.93	5.09	5.29	5.45	5.46	5.56	5.97	5.98	5.99	6.3	6.52	6.83
Subang	5.84	6.01	6.17	6.29	6.44	6.45	6.58	6.83	6.84	6.85	7.1	7.11	7.2
Purwakarta	7.01	7.04	7.07	7.11	7.17	7.35	7.42	7.74	7.75	7.92	8.09	8.1	8.11
Karawang	5.99	6.23	6.52	6.73	6.78	6.81	6.94	7.34	7.35	7.65	7.77	7.78	7.96
Bekasi	7.51	7.98	8.25	8.34	8.38	8.66	8.81	8.82	8.84	8.84	9.12	9.3	9.53
Bandung Barat	7.03	7.33	7.36	7.39	7.51	7.53	7.63	7.74	7.97	8.18	8.19	8.2	8.22
Pangandaran				7.01	7.05	7.06	7.07	7.37	7.58	7.67	7.74	7.85	8.03

Sumber: <https://jabar.bps.go.id>, tahun 2023/, diolah



Sumber: <https://jabar.bps.go.id>, tahun 2023/, diolah

Gambar 3. Perbandingan Capaian RLS Antar Kabupaten Se-Jawa Barat Tahun 2010-2022



Sumber: <https://jabar.bps.go.id>, Tahun 2023/, diolah

Gambar 4. Laju Pertumbuhan RLS Kabupaten Karawang Tahun 2011-2022

3.2. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan data dari Kemendikbud, Jumlah PKBM di Kabupaten Se-Jawa Barat disandingkan dengan data capaian RLS Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Jumlah PKBM dibandingkan dengan RLS Tahun 2022

No	Pemerintah Kabupaten	PKBM	RLS	No	Pemerintah Kabupaten	PKBM	RLS
1	Kab. Cianjur	345	7,2	10	Kab. Bekasi	68	9.53
2	Kab. Garut	250	7,83	11	Kab. Tasikmalaya	54	7.73
3	Kab. Bogor	209	8,34	12	Kab. Karawang	53	7.96
4	Kab. Indramayu	114	6,83	13	Kab. Bandung Barat	49	8.22
5	Kab. Sumedang	101	8,72	14	Kab. Subang	44	7.2
6	Kab. Sukabumi	91	7,11	15	Kab. Ciamis	37	8,00
7	Kab. Bandung	91	9,08	16	Kab. Majalengka	35	7,49
8	Kab. Kuningan	88	7,88	17	Kab. Purwakarta	22	8,11
9	Kab. Cirebon	78	7,4	18	Kab. Pangandaran	13	8,03

Sumber: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/>, diolah

3.3. Kelompok Sasaran

Penduduk pada kelompok usia 25-40 rata-rata sebanyak 772.000 orang. Apabila diasumsikan 1% saja tidak tamat SMA maka jumlah sasaran adalah 7.700 orang, maka 1 PKBM rata-rata mengawal Paket C sebanyak 150 orang sampai berijazah. Dengan simulasi matematika sederhana maka setiap tahun RLS akan terus meningkat sebesar 0.26 tahun, harapannya tidak fluktuatif seperti terjadi saat ini.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Usia 25-44 Tahun

Kelompok Umur	2018	2019	2020
25-29	202,348	203,690	204,914
30-34	201,970	203,303	204,517

Kelompok Umur	2018	2019	2020
35-39	189,383	190,718	191,940
40-44	171,038	172,331	173,527
Jumlah	766,757	772,061	776,918

Sumber: BPS Karawang, <https://karawangkab.bps.go.id>

3.4. Alokasi Anggaran Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019-2021

Pada tahun 2019, alokasi anggaran Pendidikan kesetaraan seperti tertuang pada tabel 5 berikut.

Tabel 4. Alokasi Anggaran Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	Manfaat Untuk Peserta Belajar	
			Langsung	Tidak Langsung
1	Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) Tk.Jawa Barat	129,750,000.00		√
2	Monitoring dan Evaluasi Program PNFI	197,080,000.00		√
3	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan 700.000,00 Paket A, B dan C	700,000.00	√	
4	Pendampingan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C)	118,500,000.00	√	
5	Lomba Keteladanan Lembaga Pendidikan Masyarakat (Dikmas)	43,850,000.00		√
6	Pengelolaan Data Buta Aksara dan Putus Sekolah	66,550,000.00	√	
7	Partisipasi Karawang Development Expo, HUT RI dan HUT Karawang	96,700,000.00		√
8	Peningkatan Manajemen dan Mutu SKB	300,000,000.00		√
9	Sosialisasi Program Bidang PAUD dan Dikmas	73,050,000.00	√	
TOTAL		1,026,180,000.00	258,800,000.00	767,380,000.00
KOMPOSISI MANFAAT LS X TLS			25%	75%

Sumber: BPKAD, Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, hal yang menarik adalah anggaran yang dialokasikan dalam melaksanakan program Pendidikan Non Formal/kesetaraan sebesar 1 Milyar tersebut, 25 % langsung dirasakan manfaatnya oleh peserta dan sebesar 75% manfaatnya tidak langsung dirasakan oleh peserta. Data ini memotret bahwa alokasi anggaran PNF untuk tahun 2019 tidak efektif. Dalam program tersebut juga terdapat kegiatan pengelolaan data buta aksara dan putus sekolah. Ini hal yang positif karena kebutuhan data sangat krusial untuk dapat mengalokasikan anggaran yang efektif dan efisien.

Tabel 5. Alokasi Anggaran Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020

NO	KODERING	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	Manfaat Untuk Peserta Belajar	
				Langsung	Tidak Langsung
1		Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C)	55,000,000.00		
	5.2.2.6.2	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan (Paket A,B dan C)	55,000,000.00	√	
2		Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	-		
	5.2.2.23.1	belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	-	√	
	5.2.2.17.1	Belanja uji kompetensi kursus dan pelatihan	-	√	
	5.2.2.23.1	belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	-	√	
	5.2.2.17.1	Belanja uji kompetensi kursus dan pelatihan	-	√	
3	5	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penilik dan Pengelola Lembaga PNFI	125,000,000.00		
	5.2.2.6.2	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penilik dan Pengelola PNFI	123,795,000.00		√
	5.2.2.6.1	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penilik dan Pengelola PNFI	1,200,000.00		√
	5.2.2.1.9	Peningkatan Kapasitas Penilik dan Pengelola Lembaga PNFI	5,000.00		√

4		Pendampingan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C)	-		
	5.2.2.11.2 -	belanja makanan dan minuman	0,00	√	
	5.2.2.8.1 -	belanja sewa sarana mobilitas	-	√	
	5.2.2.15.1 -	belanja perjalanan dinas	-	√	
	5.2.2.8.1 -	belanja sewa sarana mobilitas	-	√	
	5.2.2.6.2 -	belanja cetak dan pengadaan	-	√	
	5.2.2.11.2 -	belanja makanan dan minuman	-	√	
	5.2.2.6.2 -	belanja cetak dan pengadaan	-	√	
	5.2.2.15.1 -	belanja perjalanan dinas	-	√	
5		Peningkatan Manajemen dan Mutu SKB	528,940,000.00		
	5.2.2.20.7 -	belanja pemeliharaan	11,060,000.00		√
	5.2.2.11.2 -	belanja makanan dan minuman	10,800,000.00		√
	5.2.2.1.1 -	belanja bahan pakai habis	12,000,000.00		√
	5.2.1.2.2 -	belanja pegawai	80,400,000.00		√
	5.2.2.1.5 -	belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	19,827,000.00		√
	5.2.2.20.7 -	belanja pemeliharaan	11,060,000.00		√
	5.2.2.6.2 -	belanja cetak dan penggandaan	4,881,000.00		√
	5.2.2.1.1 -	belanja bahan pakai habis	12,000,000.00		√
	5.2.2.5.1 -	belanja perawatan kendaraan bermotor	69,402,000.00		√
	5.2.2.1.5 -	belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	19,827,000.00		√
	5.2.2.1.3 -	belanja jasa kantor	55,870,000.00		√
	5.2.2.6.2 -	belanja cetak dan penggandaan	4,881,000.00		√
	5.2.2.15.1 -	belanja perjalanan dinas	5,760,000.00		√
	5.2.2.5.1 -	belanja perawatan kendaraan bermotor	69,402,000.00		√
	5.2.2.11.2 -	belanja makanan dan minuman	10,800,000.00		√
	5.2.2.1.3 -	belanja jasa kantor	55,870,000.00		√
	5.2.1.2.2 -	belanja pegawai	80,400,000.00		√
	5.2.2.15.1 -	belanja perjalanan dinas	5,760,000.00		√
		TOTAL	708,940,000.00	55,000,000.00	653,940,000.00
		KOMPOSISI MANFAAT LS X TLS		8%	92%

Sumber: <http://e-planning.karawangkab.go.id>, Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, kemanfaatan alokasi anggaran program PNF semakin senjang. Manfaat yang dirasakan langsung oleh peserta belajar yaitu 8% sedangkan 92% tidak langsung dirasakan oleh peserta belajar. Terdapat kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) yang sangat bermanfaat kalau ditujukan bagi peserta belajar yang berhasil lulus Paket C karena bisa menjadi *reward* dalam meningkatkan keterampilan sehingga diharapkan peserta bisa mandiri dan mempunyai kelas pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Sayangnya, kegiatan tersebut di-*refocusing* untuk penanggulangan *pandemic covid-19*. Demikian juga dengan pendampingan Ujian Nasional. Alokasi anggaran ini sangat bermanfaat dirasakan oleh peserta belajar untuk mendapatkan ijazah paket A, B atau C.

Tabel 6. Alokasi Anggaran Pendidikan Kesetaraan Tahun 2021

NO	KODERING	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	Manfaat Untuk Peserta Belajar	
				Langsung	Tidak Langsung
1		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	15,417,400,000.00		
	5.1.4.14.1 -	BOP Kesetaraan (Paket A, Paket B & Paket C)	15,377,400,000.00	√	
	5.2.1.1.26 -	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C)	40,000,000.00	√	
2		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	30,000,000.00		
	5.2.1.1.26 -	Pendampingan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C)	30,000,000.00	√	
3		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan	30,000,000.00		
	5.2.1.1.26 -	Monitoring dan Evaluasi Program PNFI	30,000,000.00		√

4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	100,000,000.00		
	5.2.1.1.26 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penilik dan Pengelola Lembaga PNFI	100,000,000.00		√
5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	27,920,300.00		
	5.2.3.3.16 - Peningkatan Manajemen dan Mutu SKB	27,920,300.00		√
	5.1.4.14.2 - [#] Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat SosialKemasyarakatan	198,970,000.00		√
	5.2.1.1.4 - Peningkatan Manajemen dan Mutu SKB	201,479,700.00		√
	5.2.1.19.1 - [#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer	8,000,000.00		√
	13 - lainnya			
	5.2.1.4.63 - [#] Belanja Telepon/Internet	12,600,000.00		√
	TOTAL	15,605,320,300.00	15,447,400,000.00	157,920,300.00
	KOMPOSISI MANFAAT LS X TLS		99%	1%

Sumber: <http://e-planning.karawangkab.go.id>, Tahun 2021

Tahun anggaran 2021 terjadi kenaikan yang luar biasa untuk membiayai kegiatan PNF/Kesetaraan ini, dari 700 an juta pada tahun 2020 naik sangat signifikan 21 kali lipat menjadi 15 Milyar. Penulis belum mendapatkan informasi yang aktual mengenai peningkatan ini. Namun demikian secara sepintas komposisi manfaatnya sebesar 99% dirasakan langsung oleh peserta belajar. Potret ini tampak menggembirakan. Gambar 4 berikut ini merupakan potret komposisi kemanfaatan alokasi anggaran kepada peserta belajar semakin membaik.



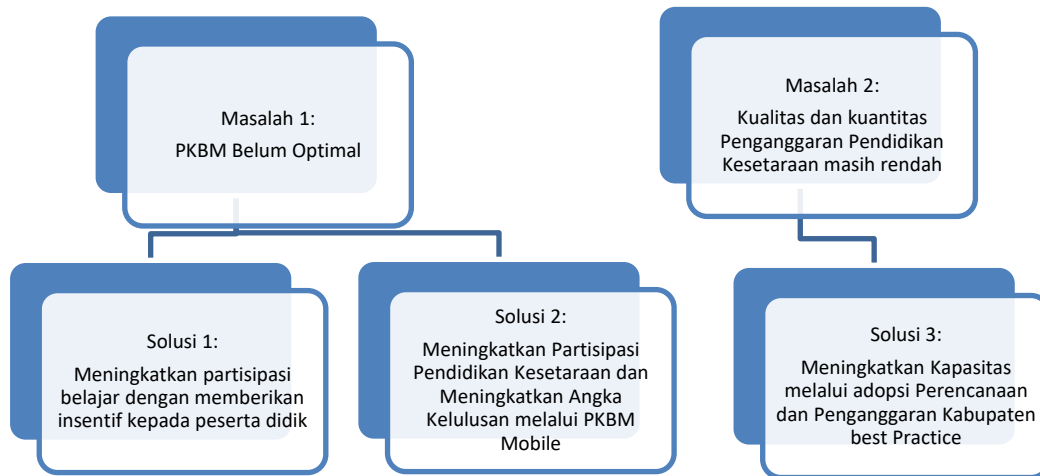
Gambar 5. Persentase Manfaat Anggaran

Dalam *policy brief ini* ditawarkan 3 solusi yang dikelompokkan menjadi prioritas-1 dan prioritas-2:

- Menyusun kebijakan insentif untuk meningkatkan partisipasi pendidikan kesetaraan melalui pendekatan kebutuhan;
- Melakukan peningkatan layanan melalui PKBM Mobile dalam rangka mengoptimalkan tingkat kelulusan pendidikan kesetaraan
- Peningkatan kapasitas perencana Bidang Pemkesos Bappeda dan pada Disdikpora terutama Bidang PAUD Dikmas melalui konsultasi ke BPKP dan replikasi pengelolaan perencanaan dan penganggaran Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis atau Kabupaten Bandung Barat.

IPM Kabupaten Karawang sudah mencapai status “Tinggi” artinya sudah berada pada level berat untuk ditingkatkan secara signifikan. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Karawang bisa mendorongnya untuk terus melaju dengan mengawal ketat dan konsisten peningkatan salah satu variabelnya yaitu indeks pendidikan khususnya Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dengan

sasaran agar di akhir RPJMD target penduduk usia 25 tahun ke atas minimal sudah berijazah SMA.



Gambar 6. Pohon Solusi

4. Referensi

- Ni Km. Peby Darmayanthi, Made Diah Lestari. (2019). Proses Penyesuaian Diri pada Perempuan Usia Dewasa Madya yang berada pada Fase Sarang Kosong, *Jurnal Psikologi Udayana*. Edisi Khusus Kesehatan Mental ,68-78;
- Kriesna Kharisma Purwanto. (2020). Tugas-tugas Perkembangan dan Permasalahannya, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=tugas-tugas+perkembangan> (Diakses 2023)
- BPS karawang. (2023). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karawang, <https://karawangkab.bps.go.id/> (Diakses 2023).
- Pemda Karawang. (2020). Alokasi Anggaran Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020, <http://e-planning.karawangkab.go.id> (Diakses 2023)
- Pemda Karawang. (2021). Alokasi Anggaran Pendidikan Kesetaraan Tahun 2021, <http://e-planning.karawangkab.go.id> (Diakses 2023)
- Anonim. (2021). Masa Dewasa Awal dan Madya, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=bab+ix+masa+dewasa+awal> (Diakses 2023)
- Anonim. Rekap PKBM Kesetaraan, <https://manajemen.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/Rekap/PKBM-PD-Kesetaraan> (Diakses 2023)